

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	v
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA	vii
SEKAPUR SIRIH	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN: KONSEP DASAR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK	1
A. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak	1
1. Konsep Perlindungan	1
2. Konsep Perempuan dan Anak	5
3. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak	7
B. Kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Internasional dan Nasional	10
1. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Internasional	10
a. <i>Universal Declaration of Human Rights (UDHR)</i>	10
b. <i>The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i>	12
c. <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)</i>	14
d. <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i>	15
e. <i>Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)</i>	18

f.	<i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i> 1989	20
2.	Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional	22
a.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22
b.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	24
c.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	24
d.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	25
e.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	27
f.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	28
g.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	29
h.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	30
i.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)	31
j.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	31
k.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	32
l.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	34
m.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	34
n.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	35



DAFTAR ISI

o.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	35
p.	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	36
q.	Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan	36
r.	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden Nomor 61 Nomor 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	37
s.	Kompilasi Hukum Islam	38
t.	Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar	39
C.	Hak-hak Perempuan dan Anak	40
1.	Hak-hak Perempuan	40
a.	Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik	42
b.	Hak Perempuan dalam Kehidupan Perkawinan dan Keluarga	42
c.	Hak Perempuan dalam Pendidikan	43
d.	Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	44
e.	Hak Perempuan dalam Bidang Kesehatan	45
f.	Hak Perempuan dalam Bidang Hukum	46
g.	Hak Perempuan dalam Bidang Ekonomi	46
2.	Hak-hak Anak	46
a.	Hak dalam Kehidupan	47
b.	Hak dalam Keluarga	48
c.	Hak dalam Kesehatan	50
d.	Hak dalam Pendidikan	50
e.	Hak untuk Berpendapat	50
f.	Hak Menikmati Kebebasan dan Memperoleh Pengasuhan Terbaik	51
g.	Hak Mendapatkan Perlindungan	52
h.	Hak Memperoleh Bantuan Hukum	52
D.	Filosofi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	54
1.	Hakikat Keadilan dalam Penyelenggaraan Peradilan	54



a.	Teori Keadilan Aristoteles	56
b.	Teori Keadilan Plato	58
c.	Teori Keadilan John Rawls	59
d.	Teori Keadilan Adam Smith	59
2.	Metabolisme <i>Biological Justice</i> dalam Perlindungan Perempuan dan Anak	60
3.	Teori Hukum yang Berkaitan dengan Feminis	65
4.	Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam	69
BAB 2	INSTRUMEN HUKUM JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	73
A.	Perlindungan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum	73
1.	Gagasan Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	73
2.	Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	75
3.	Perlindungan Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Melalui Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	77
a.	Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia	78
b.	Nondiskriminasi	80
c.	Kesetaraan Gender	80
d.	Persamaan di Depan Hukum	81
e.	Keadilan	82
f.	Kemanfaatan	82
g.	Kepastian Hukum	83
B.	Perlindungan Hak Anak Melalui Sistem Pidana Anak (SPPA)	84
1.	Sistem Peradilan Anak Indonesia	84
2.	Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak	87
3.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	89
C.	Penegakan Keadilan Restoratif dalam Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak	89
1.	Konsep Keadilan Restoratif	89
2.	Keadilan Restoratif dalam Perkara yang Melibatkan Anak	91



3.	Keadilan Restoratif dalam Perkara yang Melibatkan Perempuan	94
D.	Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Pengetatan Proses Pemberian Izin Dispensasi Kawin	98
1.	Kondisi Perkawinan Anak di Indonesia	98
2.	Faktor-faktor yang Memengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak	100
a.	Faktor Ekonomi	100
b.	Faktor Pendidikan	102
c.	Faktor Tempat Tinggal	104
d.	Faktor Tradisi dan Agama	104
e.	Faktor Pergaulan Bebas dan Kehamilan yang Tidak Diinginkan	106
3.	Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin	108
BAB 3	JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN	115
A.	Jaminan Kesetaraan Gender dalam Berbagai Bidang Kehidupan	115
1.	Konsep Kesetaraan Gender	115
2.	Prinsip Kesetaraan Gender	118
a.	Prinsip Hak Asasi Perempuan	118
b.	Prinsip Konvensi CEDAW	118
3.	Pemberdayaan Perempuan dalam Rangka Kesetaraan Gender	121
B.	Jaminan Melangsungkan Kehidupan dalam Rumah Tangga	124
1.	Relasi Perempuan dan Pasangannya dalam Kehidupan Rumah Tangga	125
2.	Hak-hak Perempuan dalam Rumah Tangga	129
a.	Jaminan Pemenuhan Nafkah	129
b.	Jaminan Pemenuhan Pendidikan bagi Istri	133
3.	Peran dan Tanggung Jawab Perempuan dalam Rumah Tangga	134
C.	Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca-Perceraian	137
1.	Jaminan Pemenuhan Nafkah Akibat Perceraian	137



a.	Hak Perempuan Pasca-Perceraian Karena Cerai Talak	138
b.	Hak Perempuan Pasca-Perceraian Karena Cerai Gugat	142
c.	Hak Istri Seorang PNS untuk Mendapatkan Sebagian Gaji Mantan Suaminya	144
2.	Jaminan untuk Memperoleh Harta Bersama	146
a.	Konsep Harta Bersama	146
b.	Klasifikasi dan Besaran Bagian Harta Bersama	148
3.	Jaminan untuk Mengasuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	151
D.	Jaminan Perlindungan Perempuan dari Segala Bentuk Kekerasan	154
1.	Ragam Kekerasan terhadap Perempuan	154
2.	Perlindungan dari Tindakan Kekerasan di Rumah Tangga	157
3.	Perlindungan dari Tindakan Kekerasan Seksual	161
a.	Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana	168
b.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	169
c.	SAPA 129 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	169
d.	Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (<i>Bullying</i>)	170
e.	Petunjuk Teknis (Juknis) B/13/72/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan	171
BAB 4 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK		173
A.	Jaminan Pemenuhan Hak-hak Anak	173
1.	Jaminan Pemenuhan Hak Anak Melalui Peran Negara	174
2.	Jaminan Pemenuhan Hak Anak Melalui Peran Keluarga	177
3.	Jaminan Pemenuhan Hak Anak Melalui Partisipasi Masyarakat	180



B.	Jaminan Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan	182
1.	Ragam Kekerasan terhadap Anak	182
2.	Perlindungan dari Tindakan Kekerasan di Rumah Tangga	186
3.	Perlindungan dari Tindakan <i>Bullying</i>	190
4.	Perlindungan dari Tindakan Kekerasan Seksual	194
C.	Jaminan Perlindungan Anak dalam Perkara Pengangkatan Anak	199
1.	Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak	199
2.	Akibat Hukum Pengangkatan Anak	203
a.	Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Peradilan Agama	205
b.	Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Peradilan Umum	206
3.	Pengangkatan Anak sebagai Ikhtiar Mewujudkan Kesejahteraan	208
4.	Problematika Pengangkatan Anak	210
D.	Jaminan Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Eksekusi Anak	211
1.	Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Pengasuhan Anak	211
2.	Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak dan Upaya Penyelesaiannya	214
a.	Keterbatasan Regulasi	214
b.	Perlawanan dari Termohon Eksekusi (Fisik dan Upaya Hukum)	215
c.	Persoalan Kompetensi Aparatur Pengadilan	217
d.	Anak yang Menjadi Objek Eksekusi Menolak untuk Dieksekusi	218
e.	Minimnya Kerja Sama dengan Instansi Perlindungan Anak Lainnya	220
E.	Jaminan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin	220
F.	Jaminan Perlindungan Anak dalam Perkara Wali Adhal	229
BAB 5	JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI SISTEM INTERKONEKSI	233
A.	Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi	233



1. Gagasan Interkoneksi Sistem Peradilan dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak	233
2. Interkoneksi Sistem Peradilan: Paradigma Baru Eksekusi Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian	235
B. Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Sistem Interkoneksi	244
C. <i>Best Practice</i> Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian di Australia	252
1. Pemenuhan Tunjangan Pemeliharaan Anak di Australia	252
a. Sejarah Singkat Tunjangan Pemeliharaan Anak di Australia	252
b. Penagihan Tunjangan Pemeliharaan Anak	254
c. Penentuan Besaran Tunjangan Anak	256
2. Keterlibatan Pengacara Independen Anak dalam Menangani Perkara yang Melibatkan Anak	261
a. Dasar Hukum Pengacara Independen Anak	261
b. Peran Pengacara Independen Anak	262
c. Mekanisme Pendampingan Anak oleh Pengacara Independen Anak	264
3. Layanan Pengadilan Berbasis pada Anak Melalui <i>Court Children Service</i>	268
D. <i>Best Practice</i> : Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian di Qatar	270
1. Perkembangan Hukum di Qatar	270
2. Pemenuhan Hak-hak Anak di Qatar	272
a. Perlindungan Hak Anak dalam Perkara <i>Hadhanah</i> dan Nafkah Anak	274
b. Perlindungan Hak Anak dalam Eksekusi Pengasuhan Anak	276
c. Perlindungan terhadap Harta Milik Anak	276
DAFTAR PUSTAKA	279
PROFIL PENULIS	305

